

NGO

Komisi II DPRD Kota Blitar Berharap Harga Minyak Goreng Dipasar Stabil

Sumartono - BLITAR.NGO.WEB.ID

Mar 28, 2022 - 22:39



Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo

KOTA BLITAR - Menjelang Bulan Ramadan nanti, Komisi II DPRD Kota Blitar bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Blitar akan menggelar operasi pasar, terkait dengan harga pokok sembako dan minyak goreng. Operasi pasar rencananya menyoar para pedagang di pasar dan pelaku industri kecil menengah (IKM).

Hal ini dikatakan, Ketua Komisi II, Yohan Tri Waluyo usai rapat paripurna perubahan anggota Alat Kelengkapan DPRD Kota Blitar masa jabatan 2019-2022, di Gedung DPRD kota Blitar, Senin (28/03/2022).

Menurut Yohan, pihaknya telah rapat dengan Disperdagin, disampaikan akan digelar pasar murah sebanyak-banyaknya. Akan tetapi dengan berkembangnya yang lebih lanjut, pemerintah mencabut HET (Harga Eceran Tertinggi) sehingga pihak dinas mengalami kesulitan.

"Waktu itu minyak curah akan dijual kepedagang pasar dan pelaku IKM dengan sosialisasi harga Rp. 12.500. Data sudah ada dan disetorkan kepada distributor di Surabaya, tetapi sebelum minyak goreng itu datang ke Blitar ternyata harganya sudah berubah," jelasnya.

Harga dari distributor sudah naik menjadi Rp. 14.000 dari harga yang direncanakan awal Rp. 12.500. Akhirnya pihak dinas sendiri kebingungan, padahal itu minyak curah.

"Pada akhirnya sampai saat ini belum terlaksana pasar murah tersebut, karena kendala harga. Meskipun di pasar minyak goreng tetap ada, tetapi harganya yang mahal dan pelaku usaha tetap membeli demi kelangsungan usahanya," paparnya.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan kalau dilihat dari berita-berita yang ada bingung juga mencari solusi. Komisi II DPRD Kota Blitar berharap, intinya harga minyak goreng harganya tetap stabil.

"Jelang puasa nanti kita akan berkoordinasi dengan Disperdagin untuk sidak pasar. Dan dimungkinkan bila dinas punya link atau distributor minyak goreng murah kita akan menggelar pasar murah untuk masyarakat," pungkas Ketua Komisi II yang membidangi pasar dan perekonomian, Yohan Tri Waluyo. (Adv/Tn)